

ISBN 978-979-19423-8-6

PROSIDING SEMINAR

Penelitian Unggulan Departemen Agribisnis

Bogor, 27 - 28 Desember 2012



Editor :

Rita Nurmalina
Netti Tinaprilla
Amzul Rifin
Tintin Sarianti
Yanti N. Muflikh



DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PROSIDING SEMINAR PENELITIAN UNGGULAN DEPARTEMEN AGRIBISNIS

Bogor, 27 - 28 Desember 2012

EDITOR :

Rita Nurmalina
Netti Tinaprilla
Amzul Rifin
Siti Jahroh
Popong Nurhayati

**PROSIDING SEMINAR
PENELITIAN UNGGULAN DEPARTEMEN AGRIBISNIS**
Bogor, 27 - 28 Desember 2012

TIM PENYUSUN

PENGARAH :

- Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS (Ketua Departemen Agribisnis)
- Dr. Ir. Dwi Rachmina, MS (Sekretaris Departemen Agribisnis)
- Dr. Ir. Anna Fariyanti, MS (Gugus Kendali Mutu FEM - IPB)

EDITOR :

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS
- Anggota : - Dr. Ir. Netti Tinaprilla, MM
- Dr. Amzul Rifin, SP., MA
- Tintin Sarianti, SP., MM
- Yanti N. Muflikh, SP., M.Agribuss

TIM TEKNIS :

- Nia Rosiana, SP., M.Si

DESAIN DAN TATA LETAK :

- Hamid Jamaludin M., AMd

Diterbitkan Oleh :

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jl. Kamper Wing 4 Level 5 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

Telp/Fax : 0251-8629654

e-mail : depagribisnis@yahoo.com, dep-agribisnis@ipb.ac.id

Website : <http://agribisnis.fem.ipb.ac.id>

ISBN : 978-979-19423-8-6

KATA PENGANTAR

Salah satu tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan penelitian. Dalam rangka mendukung kegiatan penelitian bagi para dosen, Departemen Agribisnis telah melakukan kegiatan Penelitian Unggulan Departemen (PUD) yang dimulai sejak tahun 2011. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi bagi dosen Departemen Agribisnis untuk melakukan kegiatan penelitian sehingga dapat meningkatkan kompetensi di bidangnya masing-masing. Kegiatan PUD tersebut dimulai dari penilaian proposal yang akan didanai dan ditutup oleh kegiatan seminar. Selanjutnya untuk memaksimalkan manfaat dari kegiatan penelitian tersebut, hasil penelitian perlu didiseminasi dan digunakan oleh masyarakat luas. Salah satu cara untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian tersebut adalah dengan menerbitkan prosiding ini.

Prosiding ini berhasil merangkum sebanyak 23 makalah PUD yang telah diseminarkan pada tanggal 27-28 Desember 2012. Secara umum makalah-makalah tersebut dapat dibagi menjadi tiga bidang kajian, yaitu kajian Bisnis (9 makalah), Kewirausahaan (3 makalah), dan Kebijakan (11 makalah). Bidang kajian tersebut sesuai dengan Bagian yang ada di Departemen Agribisnis, yaitu Bagian Bisnis dan Kewirausahaan serta Bagian Kebijakan Agribisnis. Dilihat dari metode analisis yang digunakan, makalah yang terangkum dalam prosiding ini sebagian besar menggunakan analisis kuantitatif. Pesatnya perkembangan teknologi komputasi dan ketersediaan software metode kuantitatif mendorong para peneliti untuk memilih metode analisis tersebut. Ke depan metode analisis kajian bidang Agribisnis perlu diimbangi dengan metode analisis kualitatif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir Rita Nurmalina, MS sebagai ketua tim PUD dan sekaligus sebagai Editor Prosiding ini beserta tim lainnya. Besar harapan kami prosiding ini dapat digunakan dan bermanfaat bukan saja di lingkungan kampus tapi juga bagi masyarakat luas.

Bogor, 1 Februari 2013
Ketua Departemen Agribisnis FEM IPB

Dr.Ir. Nunung Kusnadi, MS

DAFTAR ISI

KAJIAN BISNIS

Analisis Sikap Petani Terhadap Atribut Benih Unggul Jagung Hibrida di Sulawesi Selatan	1
Rita Nurmalina, Harmini, Asrul Koes, dan Nia Rosiana	
Analisis Usaha Sayuran <i>Indigenous</i> Kemangi di Kabupaten Bogor.....	23
Anna Fariyanti	
Analisis Kelayakan Usahaternak Sapi Perah Rakyat dan Pemasaran Susu di Jawa Timur (Studi Kasus Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Pujon, Malang - Jawa Timur).....	41
Harmini, Ratna Winandi Asmarantaka, Dwi Rachmina, dan Feryanto	
Kelayakan Usaha Peternakan Sapi Perah dalam Menunjang Swasembada Susu di Indonesia.....	61
Juniar Atmakusuma	
Kajian Sistem Pemasaran Produk Pertanian Organik dalam Rangka Menunjang Ketahanan Pangan dan Menuju Perdagangan Berkesetaraan (<i>Fair Trade</i>).....	75
Tintin Sarianti, Juniar Atmakusuma, Heny Kuswanti Daryanto, Siti Jahroh, dan Febriantina Dewi	
Pendapatan Usahatani dan Sistem Pemasaran Cabai Rawit Merah (<i>Capsicum frutescens</i>) di Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut.....	97
Rita Nurmalina, Asmayanti, dan Tubagus Fazlurrahman	
Kelayakan Usaha Pembibitan Domba Melalui Program Kemitraan dan Inkubasi Bisnis dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bogor	117
Popong Nurhayati	
Analisis Faktor dan Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Beras Organik Serta Analisis Pendapatan dan Risiko Produksi Padi Organik	137
Tintin Sarianti	
<i>Supply Chain Management</i> Jambu Kristal pada Agribusiness Development Center-University Farm (ADC-UF) IPB	157
Yanti Nuraeni Muflikh	

KAJIAN KEWIRAUSAHAAN

Analisis Faktor-Faktor Determinan Kewirausahaan Pertanian Padi Organik	177
Rachmat Pambudy, Burhanuddin, Arif Karyadi Uswandi, Yeka Hendra Fatika, Nia Rosiana, dan Triana Gita Dewi	
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Negosiasi Wirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor	199
Yusalina	

Metode Belajar Kewirausahaan di Institut Pertanian Bogor	215
Burhanuddin, dan Nia Rosiana	

KAJIAN KEBIJAKAN

Analisis Keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro	235
Dwi Rachmina	

Analisis Pengaruh Penerapan Bea Keluar pada Daya Saing Ekspor Kakao Indonesia	257
Amzul Rifin	

Strategi Pengembangan Agribisnis Sapi Perah di Jawa Timur	273
Lukman Mohammad Baga	

Kajian Stok Pangan Beras di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan	295
Andriyono Kilat Adhi, Netti Tinaprilla, dan Maryono	

Advokasi Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Bogor	313
Yusalina, Anna Fariyanti, Nunung Kusnadi, dan Yanti Nuraeni Muflikh	

Peranan dan Analisis Pendapatan Koperasi Susu di Jawa Timur (Kasus Koperasi Peternak Sapi Perah SAE Pujon)	331
Ratna Winandi Asmarantaka	

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pengguna Telepon Seluler Terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian	347
Rachmat Pambudy, dan Arif Karyadi Uswandi	

Prospek Ekspor Produk Perikanan dan Kelautan ke Uni Eropa	357
Andriyono Kilat Adhi	

Pengaruh Penerapan Teknologi Organik SRI (<i>System Rice Intensification</i>) Terhadap Penggunaan Sumber Modal Eksternal (Kasus Petani Padi di Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi)	377
Netti Tinaprilla	

Dayasaing Usahaternak Sapi Perah Rakyat di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Jawa Timur	403
Harmini dan Feryanto	

Pengaruh Realisasi APBD Bidang Pertanian Terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian di Kabupaten Bogor	425
Arif Karyadi Uswandi	

ADVOKASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BOGOR

Oleh:

Yusalina¹⁾, Anna Fariyanti²⁾, Nunung Kusnadi³⁾, dan Yanti Nuraeni Muflikh⁴⁾

^{1,2,3,4)} Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB

¹⁾yusalina_y@yahoo.com

ABSTRACT

Poverty and food security have become problems in the agricultural development in Bogor Regency. Food Self-sufficient Village (DEMAPAN) is one of government's programs to prevail over these problems. However, it is indicated that the program has not been implemented appropriately due to the lack of advocacy. Thus, this study aims to (1) identify roles of involved stakeholders in DEMAPAN, (2) describe process of advocacy conducted by stakeholders in the implementation of DEMAPAN, and (3) formulate appropriate strategy of advocacy in order to succeed DEMAPAN. This is a case study of DEMAPAN in Tegalwaru Village, Ciampea District, Bogor Regency that has been implemented since 2010. In depth interview was conducted to 14 stakeholders who are responsible for DEMAPAN. Roles of stakeholders as well as the implementation of DEMAPAN are analyzed qualitatively. In addition to that process of advocacy of DEMAPAN in term of how the programs is communicated among stakeholders, it is also analyzed through Qualitative Social Network Analysis (SNA). Result shows that the majority of stakeholders have accomplished their functions to conduct socialization, mentoring/facilitating, establishing institutions, monitoring and evaluation. Process of advocacy includes socialization, coordinations and programs synchronizations has not been well-implemented. As a result, there has been a lack of understanding regarding to general and specific guidance of the program implementation, particularly in the level of District and Village. Based on SNA, it is suggested that there should be an established institution with sufficient human resources in Bogor Regency that is responsible for Food Security Programs. In order to optimize functions of the Program Facilitator, there should be sufficient supports from the government to provide program facilitators specified for DEMAPAN.

Keywords : *Advocacy, Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN), Food Security, Social Network Analysis (SNA)*

ABSTRAK

Kemiskinan dan ketahanan pangan menjadi kendala dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Bogor. Salah satu upaya menanggulangi hal tersebut adalah Program Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN). Namun implementasi program tersebut diduga masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan sasaran program. Diduga hal tersebut terkait dengan belum optimalnya proses advokasi pada program DEMAPAN. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi peran stakeholders program DEMAPAN yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor, (2) Mendeskripsikan proses advokasi yang dilakukan stakeholder dalam penyelenggaraan program DEMAPAN, dan (3) Merumuskan strategi advokasi yang tepat untuk pelaksanaan program DEMAPAN. Penelitian ini merupakan studi kasus pada pelaksanaan program DEMAPAN Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Wawancara mendalam terhadap 14 stakeholder mulai dari tingkat Provinsi hingga Desa dilakukan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai pelaksanaan program. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis peran dan

proses advokasi dari stakeholder yang terlibat dilakukan dengan bantuan *Qualitative Social Network Analysis* (SNA). Atribut atau indikator yang dikaji adalah komunikasi antar stakeholder berdasarkan struktur organisasi DEMAPAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar stakeholders telah menjalankan peran menyampaikan informasi program (komunikasi), pendampingan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kecuali pada tingkat Kecamatan. Proses advokasi yang meliputi kegiatan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi program belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dampaknya adalah pemahaman mengenai pelaksanaan program DEMAPAN terutama pada level Kecamatan dan Desa masih redah. Berdasarkan hasil model SNA, diketahui bahwa strategi advokasi yang tepat untuk pelaksanaan program DEMAPAN adalah dengan mengoptimalkan peran institusi ketahanan pangan Kabupaten, yang tidak cukup hanya melalui Dewan namun harus ada Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang khusus menangani program-program ketahanan pangan. Bila peran pendamping dalam hal ini tetap menjadi ujung tombak pelaksanaan program, maka peran ini memerlukan dukungan SDM yang layak, memiliki fokus kerja yang jelas, dan dilaksanakan oleh lebih dari satu orang.

Kata kunci : Advokasi, Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN), Ketahanan Pangan, *Social Network Analysis* (SNA)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang telah berperan dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2011 sekitar 39,33 juta orang bekerja pada sektor pertanian. Rata-rata kepemilikan lahan petani seluas 0,3 hektar (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan, 2012). Hal ini menyebabkan terjadinya kemiskinan di pedesaan. Data BPS tahun 2009 menunjukkan dari 32,5 juta orang miskin di Indonesia berada di pedesaan, sedangkan 11,9 juta lagi tinggal di perkotaan (Arifin, 2012). Sebagian besar penduduk miskin di pedesaan bekerja di sektor pertanian. Terjadinya kemiskinan tentunya akan memunculkan masalah lainnya yaitu masalah ketahanan pangan.

Kondisi ini sangat memprihatinkan sehingga Pemerintah dengan berbagai cara berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di pedesaan. Salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan di pedesaan adalah melalui revitalisasi pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu pada tahun 2005 pemerintah mencanangkan ‘Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK)’ sebagai salah satu dari *Triple Track Strategy* dari Kabinet Indonesia bersatu dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional dan menjaga kelestarian sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan. Arah RPPK mewujudkan pertanian tangguh untuk memantapkan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani”. Selain itu, Pemerintah pada tahun 2012 mengalokasikan anggaran khusus untuk mendanai 29 program ketahanan pangan

senilai 41,9 triliun¹⁾. Dalam konteks ini, pemerintah melalui aparatnya berusaha bekerja dengan baik untuk menyampaikan kebijakan dan program tersebut. Pada kenyataannya, seringkali timbul permasalahan yang akan melibatkan berbagai pihak. Kebijakan dan program pemerintah tidak selamanya dapat diterima oleh masyarakat, selalu ada kontroversi terhadap hal tersebut. Sebagai contoh, di satu sisi pemerintah membuat program beras raskin di sisi lain pemerintah membuka keran impor beras dengan alasan untuk menjaga ketersediaan pangan nasional.

Program ketahanan pangan untuk mengatasi kemiskinan dapat dilakukan melalui kegiatan advokasi yaitu suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijaksanaan, kedudukan, atau program dari segala tipe institusi (Sharma, 2004). Dengan demikian, kegiatan advokasi memungkinkan masyarakat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya. Tujuan dari kerja advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Secara lebih spesifik, dalam praktek kerja advokasi banyak diarahkan pada kebijakan publik yang dibuat oleh para penguasa. Mengapa kebijakan publik? Kebijakan publik merupakan beberapa regulasi yang dibuat berdasarkan kompromi para penguasa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan mewajibkan warganya untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Setiap kebijakan yang akan disahkan untuk menjadi peraturan perlu dan harus dikawal serta diawasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi warganya. Hal ini dikarenakan pemerintah ataupun penguasa tidak mungkin mewakili semua pihak, sementara kekuasaannya cenderung sentralistik dan mereka selalu memainkan peranan dalam proses kebijakan.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka berbagai bentuk kegiatan advokasi dilakukan sebagai upaya memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) masyarakat (masyarakat sebagai individu khususnya petani, Asosiasi Bisnis, atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Agribisnis, dan lainnya) seperti penyadaran serta pengorganisasian kelompok-kelompok tani/usaha, pemberian bantuan hukum yang mengedepankan pembelaan hak-hak dan kepentingan anggotanya dan memberikan sejumlah layanan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Topatimasang, et al (2000) bahwa kegiatan advokasi tidak hanya *to defend* (membela), melainkan pula *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan). Dengan demikian, dalam konteks kemiskinan dan ketahanan pangan, maka kegiatan advokasi dilakukan tidak hanya mendampingi tetapi bersama-sama masyarakat melakukan upaya perubahan secara sistematis dan strategis untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

¹⁾ Supriadi, Agust. 2012. Ketahanan Pangan: Pemerintah Alokasikan Belanja Khusus Pertanian Rp. 41,9 Triliun. <http://www.bisnis Indonesia.com>. Diakses 20 Mei 2012

1.2. Perumusan Masalah

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Permasalahan umum di pedesaan di Kabupaten Bogor, relatif sama dengan fenomena pertanian di Indonesia. Kemiskinan dan ketahanan pangan menjadi hal yang dihadapi oleh pemerintah setempat terkait bidang pertanian. Di satu sisi, petani merupakan produsen berbagai komoditas pertanian, di sisi lain petani adalah konsumen berbagai komoditas yang ironisnya diproduksi oleh mereka sendiri. Terdapat *gap* antara petani sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen.

Berbagai program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat telah dijalankan, akan tetapi masalah yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketahanan pangan tetap menjadi kendala dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Bogor. Dengan demikian, diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk menyelesaikannya. Salah satunya dengan melakukan kegiatan advokasi. Advokasi dilakukan oleh berbagai kelembagaan yang menangani masalah kemiskinan dan ketahanan pangan. Akan tetapi, walaupun berbagai program telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak dengan menerapkan kegiatan advokasi, kebijakan dan program yang selama ini ditujukan kepada petani untuk meningkatkan kesejahteraannya, belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan masih terpusatnya kemiskinan di beberapa desa di Kabupaten Bogor.

Salah satu program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor dengan sasarannya adalah penduduk miskin dari desa miskin adalah program Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN). Tujuan utamanya adalah untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan dan menanggulangi desa rawan pangan. Desa sasaran program DEMAPAN di Kabupaten Bogor terdiri dari dua desa. Desa Tegalwaru Kecamatan Ciampea adalah salah satu desa sasaran program ini. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai *stakeholders*, dari tingkat provinsi sampai tingkat desa. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana sebenarnya peran *stakeholders* dalam pelaksanaan program DEMAPAN. Selanjutnya, dalam upaya pelaksanaannya, aktivitas yang dijalankan oleh berbagai *stakeholders* adalah kegiatan advokasi. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana pelaksanaan advokasi yang telah dijalankan? serta bagaimana alternatif strategi advokasi yang dapat dijalankan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi peran *stakeholders* program DEMAPAN yang dilaksanakan di Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan advokasi yang dilakukan *stakeholders* dalam penyelenggaraan program DEMAPAN tersebut.
3. Merumuskan strategi advokasi yang tepat untuk pelaksanaan program DEMAPAN.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Kemiskinan dan ketahanan pangan menjadi kendala dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Bogor, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dikembangkan berbagai program. Salah satunya adalah program Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) yang dilaksanakan di Desa Tegalwari, Kecamatan Ciampea. Pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji proses advokasi kebijakan/program yang telah/sedang berjalan, dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi peran *stakeholders* yang terlibat didalamnya. Penelitian Budiman (2012) menunjukkan bahwa *stakeholders* (rumah sakit, puskesmas, kader kesehatan dan pemerintah daerah) dalam pelaksanaan advokasi pengendalian tuberkulosis di kota Padang menjalankan peran-peran, antara lain peran penyampaian informasi, penguatan kelembagaan, pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan identifikasi peran advokasi *stakeholders* dapat mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam penerapan kebijakan/program tersebut. Perubahan ini ditunjukkan pula dalam penelitian Susilo, et al (2006) yang menyatakan bahwa advokasi nelayan tradisional melibatkan *stakeholders*, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Asisten Perhutani Bandung, *Business Development Services* (BDS), dan Inkubator Bisnis Universitas Brawidjaya, hasilnya menunjukkan bahwa arah kebijakan instansi pengelola sumberdaya pesisir telah memberikan ruang gerak yang dinamis bagi pengembangan nelayan tradisional.

Peran yang dijalankan *stakeholders* dalam kegiatan advokasi tergantung dari program/kebijakan yang dijalankan. Peran tersebut melekat pada tugas dan fungsi *stakeholders*. Secara umum, peran advokasi tersebut berorientasi pada pelayanan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Susilo (2006) menunjukkan bahwa peran advokasi berbagai *stakeholders* dalam kegiatan advokasi nelayan tradisional adalah melaksanakan pendampingan dan penguatan kelembagaan.

Berdasarkan proses advokasi yang dilakukan dalam kegiatan program/kebijakan, berbagai cara dapat dilakukan, antara lain melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, konseling, dan komunikasi interpersonal (Budiman, 2012). Sedangkan, Susilo, et.al (2006) menunjukkan proses advokasi dilakukan dengan cara diskusi dan memfasilitasi dialog dengan *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan advokasi.

Selanjutnya, untuk menggambarkan para pelaku advokasi beserta hubungan yang terjadi diantara pelaku dilakukan analisis jejaring sosial/*Qualitative Social Network Analysis* (SNA). SNA merupakan ilmu untuk memahami struktur, interaksi dan posisi strategis aktor dalam sebuah jejaring sosial atau *social network* (Wasserman dan Faust 1994, Scott 2000). Dengan demikian, SNA merupakan proses pendeskripsian dan pengukuran hubungan dan aliran antar orang, grup, organisasi, komputer atau entitas lainnya, misalnya informasi/pengetahuan yang dimilikinya. *Social network* mengandung unsur set dari aktor/pelaku atau *node* dan unsur

hubungan antar pelaku/*node*, dan dapat merupakan hubungan pertemanan, hubungan saudara maupun hubungan kerja.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus pada program DEMAPAN di Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi penelitian dilaksanakan secara sengaja (*purposive*) karena Desa Tegalwaru telah dan sedang melaksanakan program DEMAPAN dari tahun 2010, sehingga evaluasi pelaksanaan program sudah dapat dilaksanakan. Untuk memperoleh data primer, wawancara mendalam dengan *stakeholders* program DEMAPAN dengan bantuan daftar pertanyaan dan alat perekam suara, dilakukan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai pelaksanaan program, yang terdiri dari 14 orang (dua orang *stakeholders* tingkat provinsi, tiga orang di tingkat kabupaten, satu orang dari tingkat kecamatan, dan delapan orang tingkat desa). Pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus-November 2012. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya publikasi umum dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan institusi dan individu terpublikasi serta jurnal penelitian. Analisis *stakeholders* dilakukan berdasarkan analisis jejaring sosial/*Qualitative Social Network Analysis* (SNA) dengan bantuan software *yEd – Graph Editor*, untuk menggambarkan para pelaku advokasi beserta hubungan yang terjadi diantara pelaku tersebut.

Analisis peran dan proses advokasi dari masing-masing *stakeholders* dilakukan secara deskriptif kualitatif, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh yang dibandingkan dengan peran secara teori advokasi maupun berdasarkan kebijakan (peraturan pemerintah terkait peran kelembagaan). Dengan demikian, efektivitas peran dapat digambarkan melalui atribut-atribut berdasarkan pemahaman teori dan kebijakan yang ada tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Program Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)

Program DEMAPAN merupakan salah satu perwujudan program ketahanan pangan nasional. Adapun landasan ketahanan pangan didasarkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, bahwa pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Pemerintah berupaya mewujudkan kemandirian pangan melalui pemberdayaan masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui strategi jalur ganda/*twin track strategy*: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.

Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, sejak tahun 2006 telah meluncurkan Kegiatan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN), yang diharapkan dapat mendorong kemampuan masyarakat desa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarganya, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif. Sasarankegiatannya adalah Rumah tangga miskin di desa rawan pangan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat. Tujuan program DEMAPAN secara umum adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki/dikuasainya secara optimal, dalam mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Aktivitas yang dilakukan meliputi: (1) pemberdayaan masyarakat; (2) penguatan kelembagaan; (3) pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; dan (4) integrasi program sub sektor dan lintas sektor dalam menjalin dukungan pengembangan sarana prasarana perdesaan.

Jumlah lokasi kegiatan program DEMAPAN di Jawa Barat yang bersumber dari APBN sejak tahun 2006 hingga 2011 adalah sebanyak 159 desa. Mulai Tahun 2011 Pemprov Jabar mengalokasikan dana APBD untuk mendukung kegiatan bantuan dana sosial untuk DEMAPAN di enam kabupaten yaitu: Kabupaten Garut, Kota Banjar, Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon, dengan lokasi di 12 Desa.

Pada Tahun 2012, dikembangkan program DEMAPAN di 14 Desa dan tujuh Kabupaten yaitu: Bogor, Cianjur, Subang, Cirebon, Indramayu, Sukabumi dan Kuningan yang merupakan daerah pesisir dan perbatasan provinsi sebagai wilayah yang ditengarai merupakan daerah yang memiliki permasalahan dalam hal ketahanan pangan. Diharapkan, masyarakat yang tergabung dalam kelompok afinitas mampu mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu mengambil keputusan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan harus lebih dominan. Untuk memberikan arahan dan pedoman kegiatan di lapangan maka diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012.

Dalam realisasinya, kegiatan DEMAPAN dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu: proses persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Pelaksanaan kegiatan dilakukandengan pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa, pengembangan sistem ketahanan pangan, dan peningkatan koordinasi lintas subsektordan sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan.

4.2. Peran Stakeholders Program Ketahanan Pangan Desa Mandiri Pangan

Stakeholders yang terlibat dalam kegiatan DEMAPAN memiliki peranan masing-masing sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan, baik sebagai koordinator kegiatan, penanggung jawab kegiatan maupun pelaksana kegiatan serta

sasaran kegiatan mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Namun pada pelaksanaannya terdapat berbagai penyesuaian menurut kondisi wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa setempat. Contohnya, karena belum terbentuk BKP di Kabupaten Bogor, maka penanggung jawab sekaligus koordinator kegiatan DEMAPAN di Kabupaten Bogor adalah Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Hal ini dapat dinyatakan oleh Ketua BP4K.

“...belum ada badan yang menangani ketahanan pangan, ya untuk menangani ketahanan pangan kan masih ditempelkan di dinas Anu-anu, masih macem-macam lah, sebenarnya kalo ibaratnyanya kita ada fasilitasi untuk koordinasi, ada rapat-rapat pokja, tatapi ibarat penumpang sudah siap, kapalnya belum ada..” (Ketua BP4K)

Di tingkat kecamatan seharusnya yang lebih berperan Kepala Kecamatan (Camat) namun yang berperan adalah Kepala Seksi Perekonomian. Namun demikian berdasarkan hasil wawancara pihak Kecamatan tidak banyak berperan dan memahami program tersebut. Demikian halnya dengan koordinator pendamping Kabupaten, di Kabupaten Bogor tidak terdapat koordinator pendamping hanya pelaksana teknis DEMAPAN yakni sekretariat DKP yang hanya berjumlah tujuh orang. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan pendamping.

‘Ya mungkin karena program yang ada di Kecamatan itu banyak sekali. Dan program DEMAPAN itu kalo ada kegiatan dari Kabupaten langsung datangnya ke Desa..jadi kecamatan itu tidak begitu mengetahuinya.’ (Pendamping)

Berkaitan dengan peran dalam advokasi, meliputi kegiatan penyampaian informasi, pendampingan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan monitoring evaluasi. Namun dalam pelaksanaannya, belum semua peran tersebut dijalankan secara maksimal. Contohnya kegiatan pendampingan yang dilakukan pendamping DEMAPAN di desa.

“Saya tidak bisa terjun ke lapang untuk mendampingi kegiatan DEMAPAN setiap hari. Karena tugas utama saya sebagai seorang penyuluh juga harus dijalankan. Jadi saya harus membagi waktu kerja dalam tugas yang saya jalankan dalam seminggu untuk tugas saya sebagai penyuluh dan tugas saya sebagai pendamping...” (Pendamping DEMAPAN)

Peran advokasi yang telah/belum dilaksanakan oleh setiap *stakeholder* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Peran Advokasi *Stakeholders* dalam kegiatan Program Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)

No	Stakeholders	Informasi	Pendampingan	Penguatan kelembagaan	Pengawasan	Monitoring dan Evaluasi
1	Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	√	√	√	√	√
2	Badan Ketahanan Pangan Jawa Barat	√	√	√	√	√
3	Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor	√	√	√	√	√
4	Kecamatan Ciampea	√	-	-	-	-
5	Kepala Desa/ Tim Pangan Desa	√	√	√	-	√
6	Pendamping DEMAPAN	√	√	√	√	√
7	Lembaga Keuangan Desa (LKD)	√	√	-	-	√

4.3. Proses Advokasi Program Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)

Program atau kebijakan yang sifatnya *topdown* atau berasal dari para pengambil kebijakan itu sendiri, apalagi kebijakan dari pemerintah pusat tidak mudah untuk dapat dengan cepat dan tepat difahami dan diimplementasikan pada masyarakat. Banyaknya pihak yang terlibat pada setiap level birokrasi serta sumberdaya dan sumberdana yang terbatas membutuhkan proses yang tepat baik dalam hal koordinasi maupun sosialisasi serta integrasi program agar program benar-benar sampai dan dapat difahami serta diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat sasaran. Namun dalam implementasi terdapat beberapa modifikasi strategi yang dilakukan oleh para *stakeholders* mulai dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Desa mulai dari sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor. Misalnya kegiatan dalam hal sosialisasi program yang dilakukan DKB Kabupaten secara informal. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DKP Kabupaten Bogor.

“....sederhana bentuknya begitu ada program dari propinsi yang penting tujuan, sasaran tercapai melalui diskusi dgn kelompok tani, gak ada tuh yg namanya seminar, duitnya ge euweh (gak ada), seperti itu lah, untuk beberapa kelompok kita yang mengakomodiasi tempat pelatihan....(Sekretaris DKP Kabupaten Bogor)

Selain itu, kegiatan koordinasi di tingkat desa belum optimal dijalankan, seperti pernyataan dari Bapak R selaku ketua LKD.

“Kita ini karena memiliki tanggung jawab pekerjaan masing-masing, jadi memang intensitas koordinasi optimal semua tim relatif sulit.. kecuali saya dengan pendamping. Karena pendamping biasanya lebih sering di lapang...”(Bapak R, Ketua LKD, Ketua Kelompok Afinitas Setuju 2)

Tabel 2 menunjukkan proses advokasi yang telah dilaksanakan oleh *stakeholders* program DEMAPAN.

Tabel 2. Proses Advokasi yang dilaksanakan oleh Stakeholders Program Desa Mandiri Pangan DEMAPAN)

No	Stakeholders	Sosialisasi	Koordinasi	Sinkronisasi Program
1	Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	√	√	√
2	Badan Ketahanan Pangan Jawa Barat	√	√	√
3	Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor	√	√	√
4	Kecamatan Ciampea	-	-	-
5	Kepala Desa/Tim Pangan Desa	√	√	-
6	Pendamping DEMAPAN	√	√	-
7	Lembaga Keuangan Desa (LKD)	√	√	-

Salah satu contoh dampak dari kurang efektifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DKP Kabupaten Bogor adalah pemahaman pendamping mengenai pembentukan kelompok afinitas (sasaran program). Idealnya dalam satu Desa terdapat 4-5 kelompok, faktanya terdapat 14 kelompok afinitas. Hal tersebut juga berdampak pada semakin beratnya tugas pendamping dalam melakukan pendampingan, koordinasi dan sinkronisasi program di tingkat Desa.

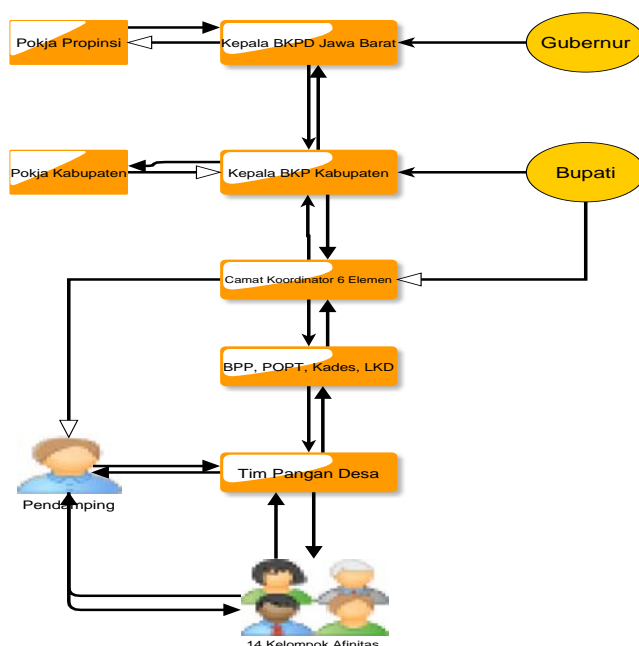
“Nah penentuan 14 kelompok afinitas, waktu itu saya belum dilatih hanya diberikan sk untuk pendampingan, hanya menerima instruksi pimpinan, ternyata setelah saya ikut pelatihan ke Bandung baru tahu bahwa kel tidak harus 14 kelompok, bisa di bawah 14 karena ini program baru masih meraba-raba ya hasilnya begini, mungkin bisa dibentuknya 4 kelompok saja” (Pendamping DEMAPAN).

4.4. Strategi Advokasi Program Ketahanan Pangan Desa Mandiri Pangan di Desa Tegalwaru

4.4.1. Model Koordinasi dalam Tata Organisasi DEMAPAN sesuai Petunjuk Pelaksanaan DEMAPAN

Pada Model SNA yang sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan, para aktor yang terlibat mulai dari tingkat Provinsi adalah sebagai berikut (1) Kepala BKP Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai penanggung jawab dibawah komando Gubernur Jawa Barat dan dilaksanakan oleh Pokja Provinsi Jawa Barat ; (2) Kepala Kantor/ Dinas/ Unit Kerja Ketahanan Kabupaten sebagai penanggung jawab program dibawah komando bupati dan dilaksanakan oleh pokja ketahanan pangan Kabupaten. Kepala Kantor Kabupaten Berkonsultasi kepada Kepala kantor Provinsi; (3) Kepala Kecamatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan DEMAPAN. Gambar 1

menunjukkan *Social Network* pada Organisasi Program DEMAPAN sesuai Petunjuk Pelaksanaan.



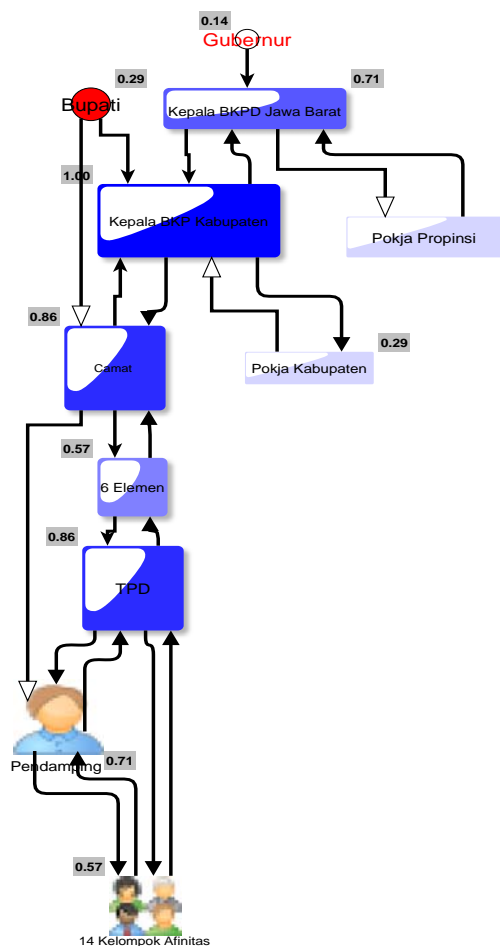
Gambar 1. *Social Network* pada Organisasi Program DEMAPAN sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Model Ideal)

Social Network pada Gambar 1 merupakan model ideal yang menggambarkan bagaimana seharusnya proses advokasi dilaksanakan melalui proses sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi program, agar tujuan program DEMAPAN tersebut dapat direalisasikan dengan efektif dan efisien. Pada proses advokasi ini bentuk atribut yang dievaluasi adalah keakuratan informasi mengenai program DEMAPAN yang disosialisasikan mulai dari tingkat Provinsi hingga diimplementasikan pada tingkat kelompok Afinitas.

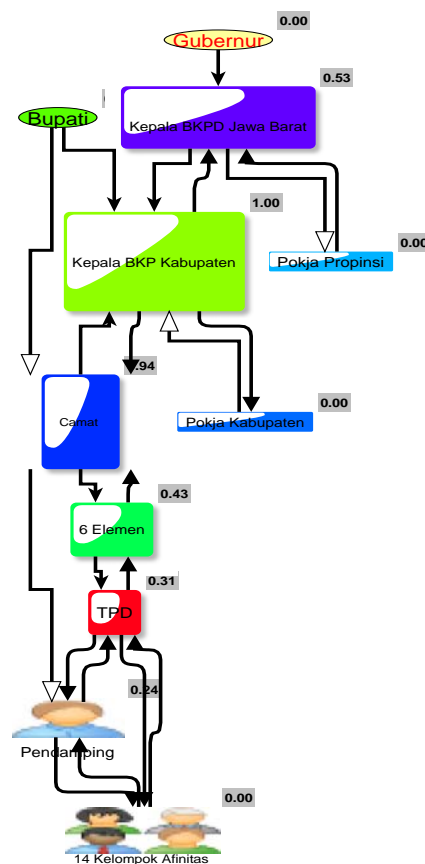
Hasil SNA pada model ideal DEMAPAN tersebut ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3. Berdasarkan hasil analisis mengenai *Degree of Centrality* atau banyaknya koneksi (hubungan komunikasi) yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dalam program DEMAPAN, diperoleh bahwa Kepala BKP Kabupaten memiliki *degree of centrality* yang paling tinggi. Artinya Kepala BKP memiliki hubungan komunikasi baik yang paling banyak (1) dalam bentuk sosialisasi, koordinasi maupun sinkronisasi program dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam program. Implikasi dari pemetaan SNA ini adalah bahwa kepala BKP harus menjadi pusat atau ujung tombak dalam menggerakkan program DEMAPAN di Kabupaten atau wilayahnya. Selain itu, Camat (0,86) merupakan ujung tombak dalam kegiatan DEMAPAN di wilayahnya karena memiliki keterhubungan komunikasi dengan lebih

banyak pihak. Di samping itu TPD (0.80) yang digerakkan oleh aparat desa sangat berperan dalam menggerakkan program DEMAPAN di Desa. Pendamping merupakan stakeholder yang juga berperan cukup penting (0,71) dalam membantu menggerakkan program DEMAPAN meskipun peranannya harus dibantu oleh banyak pihak.

Kelompok Afinitas pun harus memiliki pemahaman yang baik mengenai DEMAPAN agar tujuan program dapat terealisasi dengan baik. Artinya siapapun pihak yang berhubungan dengan kelompok Afinitas harus memberikan dan mengarahkan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan DEMAPAN agar praktiknya tidak keluar dari rambu-rambu yang ditegaskan dalam Pedoman Umum Maupun petunjuk pelaksanaan.



Gambar 2. Degree of Centrality pada Model Ideal

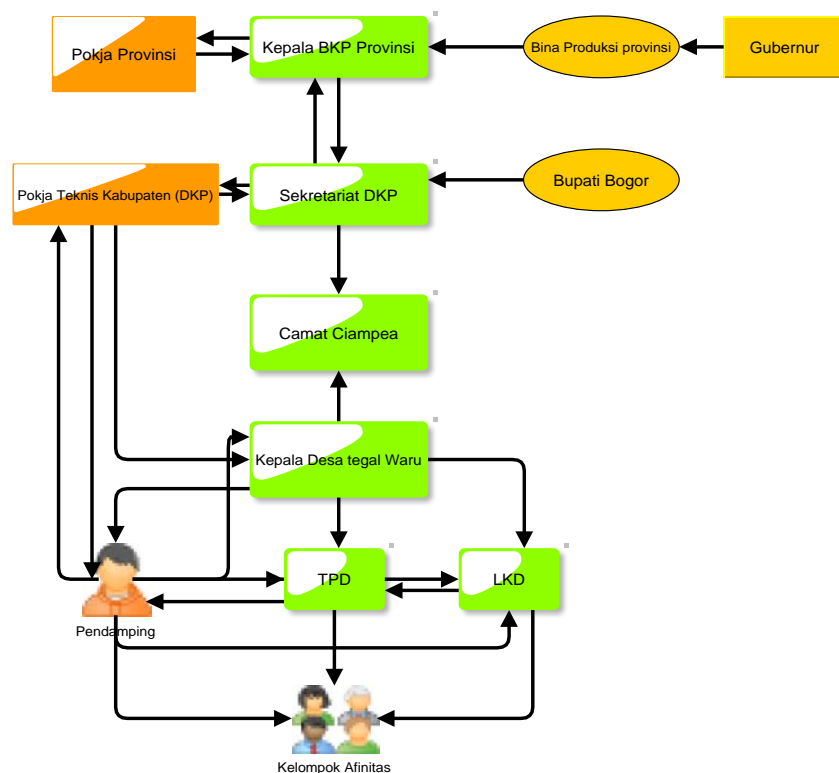


Gambar3. Betweenness of centrality pada Model Aktual

Berdasarkan hasil analisis *betweenness centrality* diperoleh bahwa pihak yang berperan paling penting sebagai penghubung dengan pihak lainnya dalam program DEMAPAN adalah Kepala BKP Kabupaten (1). Kepala BKP Kabupaten harus menjadi pihak yang menjembatani hubungan komunikasi antar pemerintahan provinsi dan pemerintahan Kecamatan dan desa sasaran dalam kegiatan DEMAPAN. Pihak yang berperan penting lainnya dalam hal menjadi penghubung antara berbagai stakeholder di tingkat Kecamatan dan Kabupaten adalah Camat. Camat harus menjadi jembatan penghubung yang baik antara Kabupaten dan Desa sasaran berkaitan dengan pelaksanaan program DEMAPAN.

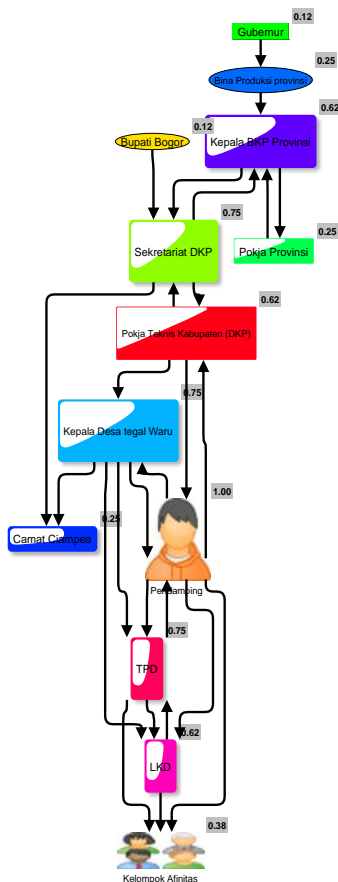
4.4.2. Model Koordinasi dalam tata organisasi DEMAPAN yang sebenarnya terjadi di dalam implementasi program DEMAPAN (Model Aktual)

Dalam implementasinya, tidak semua pelaksanaan dalam tataorganisasi DEMAPAN dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari model aktual proses Advokasi dalam berbagai bentuk komunikasi (baik sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi program dan pendampingan) dalam kegiatan DEMAPAN di Kabupaten Bogor yang telah berlangsung selama tiga tahun atau sudah pada tahap pengembangan.

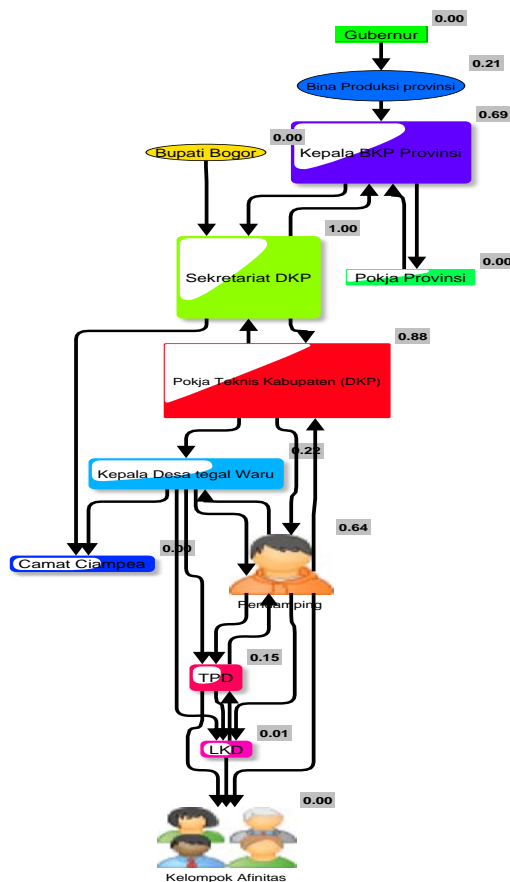


Gambar 4. Model Aktual dari *Social Network* pada Program DEMAPAN di Kabupaten Bogor Berdasarkan Ukuran Konektivitas

Berdasarkan hasil SNA yang ditunjukkan oleh Gambar 5 dan Gambar 6, maka *degree of centrality* tertinggi adalah pada pendamping (1). Hal tersebut menunjukkan bahwa pendamping memiliki lokal koneksi (atau koneksi) langsung paling banyak dengan pihak-pihak yang terlibat dalam DEMAPAN. Artinya pendamping sebagai sentral komunikasi bagi banyak pihak dalam hal menyukseskan program DEMAPAN. Hal tersebut dapat menjadi hal yang positif atau bahkan menjadi hal yang negatif. Hal yang positif adalah bahwa jika pendamping menjadi pihak yang paling penting dalam hal keterhubungan dengan banyak pihak, hal ini tentunya sangat menguntungkan karena pendamping memang memahami permasalahan di desa tersebut. Peran pendamping menimbulkan masalah yang negatif saat ini, karena sumberdaya pendamping hanya satu orang untuk total 14 kelompok afinitas. Hal tersebut dapat berdampak pada kurang fokusnya kegiatan DEMAPAN yang dijalankan oleh pendamping mengingat beban kerja yang begitu berat harus berkomunikasi dengan banyak pihak, selain juga harus menjalankan tugasnya sebagai penyuluh.



Gambar 5. Degree of Centrality pada Model Aktual



Gambar 6. Betweenness Centrality pada Model Aktual

Dalam hal *betweenness of centrality*, ternyata sekretariat DKP Kabupaten Bogor (1) dan sekaligus Pelaksana teknis DKP (0,88) memegang peranan yang *paling* penting dalam menjembatani hubungan antar pihak-pihak yang terlibat dalam DEMAPAN. Proaktif sekretariat DKP terutama pokja atau pelaksana teknis dalam kegiatan DEMAPAN memang dirasakan oleh banyak pihak di Kabupaten Bogor. Pokja teknis DKP yang sering berhubungan dengan BKP provinsi Jawa Barat dan juga proaktif dalam memonitor kegiatan DEMAPAN di tingkat Desa dan berhubungan dengan stakeholder di tingkat desa mulai dari pendamping hingga kelompok afinitas. Namun demikian, peranan Camat Ciampea sangat kurang dirasakan kontribusinya dalam kegiatan DEMAPAN. Hal tersebut perlu menjadi perhatian dari pihak kecamatan agar beban kerja tidak dilaksanakan oleh pihak yang tidak semestinya menanggung hal tersebut.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Peran *stakeholders* dalam advokasi program DEMAPAN secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat *stakeholders* yang belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Peran yang telah dijalankan, antara lain menyampaikan informasi program (komunikasi), pendampingan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). Peran yang belum berjalan dengan baik diantaranya *stakeholders* yang memiliki peran ganda sebagai ketua merangkap anggota, sehingga proses pengawasan menjadi tidak jelas. Selain itu, masih adanya peran yang mencakup hal teknis yang harusnya dipahami dengan baik oleh *stakeholders*, tetapi tidak menjadi perhatian lembaga.

Proses advokasi meliputi kegiatan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi program belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena beberapa *stakeholders* belum menjalankan perannya sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan DEMAPAN. Dampaknya adalah pemahaman mengenai pelaksanaan program DEMAPAN terutama pada level Kecamatan dan Desa masih rendah

Berdasarkan *degree of centrality* atau banyaknya hubungan komunikasi dan *betweenness of centrality* dari model SNA, diketahui bahwa strategi advokasi yang tepat untuk pelaksanaan program DEMAPAN adalah dengan optimalisasi peran DKP Kabupaten Bogor, termasuk pelaksana teknisnya hingga ke level Desa. Bila peran pendamping dalam hal ini tetap menjadi ujung tombak pelaksanaan program, maka peran ini memerlukan dukungan SDM yang layak, memiliki fokus kerja yang jelas, dan dilaksanakan oleh lebih dari satu orang.

5.2. Saran

Penelitian ini menunjukkan adanya peran rangkap yang dijalankan oleh *stakeholder* sehingga ada ketidakjelasan tugas. Satu sisi, sebagai Kepala Desa

sementara di sisi lain berperan sebagai TPD, yang seharusnya TPD tersebut di bawah pengawasan Kepala TPD. Anggota TPD harus terdiri dari wakil perangkat Desa, namun bukan Kades, dan wakil dari komponen masyarakat. Dengan demikian, pada pelaksanaan program tidak terjadi peran yang rangkap, agar masing-masing *stakeholders* tersebut dapat bekerja optimal sesuai peran dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, proses penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan mudah karena adanya kesadaran masing-masing *stakeholder* akan perannya.

Program DEMAPAN di Desa Tegalwaru belum menunjukkan adanya hubungan lintas sektor, sehingga peran Kepala Desa sebagai penanggung jawab program DEMAPAN di tingkat Desa harusnya dapat mengintegrasikan program ini dengan sektor yang lain, misalnya : sektor pertanian, perindustrian, pekerjaan umum, kesehatan, dan lainnya; termasuk juga program-program yang dikelola oleh swasta, misalnya kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu, proses integrasi lintas sektor juga harus menjadi tanggung jawab pihak Kecamatan Ciampea dan disosialisasikan dalam setiap kegiatan rapat atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Mengingat di Kabupaten Bogor belum ada lembaga yang menangani ketahanan pangan secara mandiri, maka diperlukan pendirian Badan Ketahanan Pangan seperti daerah yang lain. Dengan demikian, fungsi dan perannya menjadi jelas dan tidak tumpang tindih dengan fungsi dan peran BP4K yang sangat luas.

Mayoritas penduduk miskin di pedesaan, khususnya di Tegalwaru bekerja di sektor pertanian, namun akses bantuan ini justru dimanfaatkan oleh masyarakat yang berusaha di bidang lain. Hal ini mungkin terjadi karena para petani tersebut sudah mendapatkan bantuan dari program lainnya (misalnya PNPM Mandiri, PUAP, dll), sehingga tidak menjadi prioritas sasaran. Oleh karena itu, sasaran program perlu melibatkan para petani tersebut.

Berbagai kelemahan yang timbul sebagai implementasi dari uraian di atas berakar dari kurang efektifnya kegiatan advokasi terutama dalam hal sosialisasi pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan program mulai dari tingkat Kabupaten Bogor serta Koordinasi antar *stakeholders*. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dalam setiap program apapun harus dilaksanakan secara lebih efektif dan intensif dan harus ada evaluasi dari setiap kegiatan sosialisasi tersebut. Kontrol dari sosialisasi dan implementasi program adalah adanya koordinasi yang baik antar *stakeholder* melalui berbagai media komunikasi. Selain itu, perlu peningkatan dana sosialisasi dari APBN 1 dan 2, mengingat dana yang tersedia saat ini kurang memadai.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis proses advokasi untuk program DEMAPAN di Kabupaten lain yang sudah sampai pada tahap kemandirian dan sudah terdapat BKP Kabupaten. Hal tersebut agar menjadi pembandingan dengan penelitian ini. Di samping itu, perlu ada penelitian mengenai advokasi untuk program-program pemerintah yang lain dengan pendekatan analisis yang berbeda agar dapat memperkuat, menambah dan memperbaiki pendekatan analisis dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. 2012. Pembangunan Pertanian untuk Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Format Baru Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian Indonesia 2010-2014. (Editor: Rudi Wibowo, Hermanto Siregar, dan Arief Daryanto. 2012. IPB Pers. Bogor
- Budiman, H. 2011. Analisis Pelaksanaan advokasi, komunikasi dan mobilisasi social dalam pengendalian Tuberkulosis di Dinas Kesehatan Kota Padang.[Thesis]. Program Pascasarjana. Universitas Andalas, Padang.
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2012. Pembangunan Perdesaan dan Pemberdayaan Petani untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Sharma, R.R. 2004. Pengantar Advokasi : Panduan dan Latihan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Topatimasang, R., Fakih M, dan Rahardjo T. 2000. Merubah Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Susilo, E., Wisadirana, D., Syafaat, R., Musa, M., Purwanti, P. 2006. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial (Social Sciences). Vol . 18, No. 1, Februari 2006.
- Wasserman, Stanly and Faust katherine. 1994. Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge University Press. New York

DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

JL. KAMPER. WING 4 LEVEL 5, KAMPUS IPB DRAMAGA BOGOR
TELP (0251) 8629654

